

## Artikel 2

### 1. Sitasi Artikel

Djihanurhaba, N., Vitianingsih, A. V., Riza, M. S., Lidya, A., & Watis, S. F. A. (2024). Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Bantuan Non Tunai Menggunakan Metode AHP dan WP. *JOINTECS (Journal of Information Technology and Computer Science)*, 9(1), 11–20. <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jointecs>

### 2. Latar & Tujuan

Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang masih belum objektif dan adil, dapat menyebabkan ketidakpuasan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP dan WP untuk membantu penentuan penerima BPNT secara lebih akurat.

### 3. Metode

Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian diantaranya, Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan bobot kriteria, dan Weighted Product (WP) untuk menghitung nilai akhir dan menentukan peringkat alternatif. Data diperoleh dari kriteria penilaian calon penerima BPNT, yang kemudian dianalisis dalam sistem pendukung keputusan berbasis desktop.

### 4. Hasil/Temuan Kunci

Sistem berhasil membedakan peringkat kelayakan dari alternatif berdasarkan kriteria AHP dan hasil perhitungan WP. Kriteria yang digunakan adalah penghasilan, jumlah tanggungan, pekerjaan, dan kepemilikan aset. Hasil menunjukkan bahwa integrasi AHP dan WP memberikan keputusan yang lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 5. Kontribusi & Keterbatasan

kontribusi ini menggabungkan AHP dan WP untuk penyaluran bantuan sosial secara praktis dan membangun sistem pendukung keputusan yang dapat diimplementasikan langsung di lapangan oleh instansi terkait. selanjutnya keterbatasan data kriteria bersifat lokal (belum diuji untuk wilayah lebih luas) dan tidak membahas validasi sistem melalui uji lapangan atau respon pengguna secara menyeluruh.

### 6. Takeaway Anda

Pendekatan AHP dan WP sangat efektif dalam sistem pengambilan keputusan sosial seperti BPNT. Ini bisa menjadi model awal untuk membangun sistem seleksi penerima bantuan yang lebih adil di proyek pemerintahan atau CSR perusahaan.